

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada awal Juli 2022 muncul pemberitaan di berbagai media *online*, salah satu pemberitaan yang sempat menjadi *trending* di Indonesia adalah kasus Brigadir J bermula dari berita *viral* mengenai *insiden* tembak-menembak antara sesama anggota Polisi di rumah dinas Kepala Divisi (Kadiv) Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), jalan Duren Tiga, no. 46, Jakarta Selatan pada Jumat, 8 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB. Terjadinya penembakan yang dilakukan oleh seorang petinggi Polri atau yang dikenal dengan Ferdy Sambo, kepada salah satu bawahannya yaitu Brigadir J adalah suatu peristiwa yang tidak terduga bahkan oleh institusi Polri sendiri. Tepat pada bulan Juli yang lalu peristiwa ini mengalihkan seluruh perhatian setiap masyarakat, Brigjen Ahmad Ramadhan menyampaikan dugaan sementara penyebab dari pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo pada bawahannya, karena adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Josua kepada istri dari Ferdy Sambo yang saat itu sedang tidak ada di lokasi karena sedang melakukan *test PCR*.

Pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan atasannya, mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, dan istrinya Putri Candrawathi menuai keprihatinan masyarakat luas. Berbagai media massa, baik media cetak, media elektronik (televisi dan radio) maupun media sosial, memberikan liputan yang luas tentang perkara hingga ke pengadilan. Selama beberapa bulan kasus tersebut bergulir, masyarakat terus mengikuti perkembangannya. Mereka berharap motif pembunuhan segera terungkap dan para pelaku pembunuhan dijatuhi sanksi hukuman yang seadil-adilnya. Misteri kematian hingga dinamika persidangan kasus yang ditampilkan secara terus menerus di seluruh media massa cukup menguras perasaan dan pikiran khalayak media, tak terkecuali keluarga

almarhum Brigadir J. Orangtua almarhum Brigadir J sangat terpukul dan trauma saat mengetahui anaknya meninggal pada 8 Juli 2022. Bahkan keluarga korban sangat terguncang setelah mengungkap adanya kejanggalan dari kondisi almarhum Brigadir J setelah jenazah dipulangkan ke kampung halamannya di Jambi. Bagi keluarga korban tentu kondisi ini tak mudah untuk dihadapi. Butuh waktu cukup lama bagi orangtua Brigadir J, terutama sang ibunda Rosti Simanjuntak untuk berdamai dengan hatinya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui banyak kejanggalan dalam penanganan awal kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Dia mengatakan kasus kematian Brigadir J yang diumumkan jajaran Polri sebelumnya diduga hasil rekayasa. Pernyataan tersebut dimuat dari pemberitaan CNN Indonesia yang ada di Gambar 1.1



**Gambar 1. 1** Kapolri akui terdapat kejanggalan pada awal kematian Brigadir J

*Sumber : CNN Indonesia*

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan kasus kematian Brigadir J yang diumumkan jajaran Polri sebelumnya diduga hasil rekayasa. Seperti yang disampaikan Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers nya

yang mengatakan “Pada saat pendalaman dan olah TKP, ditemukan ada hal-hal yang menghambat proses penyidikan dan kejanggalan-kejanggalan yang juga kita dapatkan, seperti hilangnya CCTV dan hal-hal lain. Sehingga muncul dugaan ada hal-hal yang ditutupi dan direkayasa,”. (Sumber : CNN Indonesia). Kapolri Jenderal Listyo menyatakan Tim khusus (Timsus) Polri yang dibentuk menemukan kejanggalan-kejanggalan seperti penghilangan barang bukti hingga upaya menghalangi penyidikan. Termasuk saat jenazah Brigadir J diserahkan ke keluarga di Jambi, berbagai pihak melihat adanya kejanggalan terhadap pernyataan awal, maka dari itu Kapolri Jenderal Listyo mengatakan “Oleh karena itu, untuk membuat terang peristiwa yang terjadi timsus telah melakukan pendalaman dan ditemukan ada upaya menghilangkan barang bukti, merekayasa, menghalangi proses penyidikan sehingga proses penanganannya menjadi lambat," terang Listyo. “Tindakan yang tidak profesional pada saat penanganan dan olah TKP serta tindakan-tindakan tidak profesional lain saat penyerahan Jenazah Brigadir J di Jambi”. (Sumber : CNN Indonesia)

Pada kejadian Brigadir J, kasus penembakan yang dilakukan Melalui mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo kepada anak buahnya, yakni Brigadir J, Bharda menginstruksikan Eliezer yang merupakan rekan ajudannya untuk mencuri perhatian publik. Tak hanya itu, isu ini membuat Yayasan Polri mendapat kecaman dari berbagai pihak. Kasus ini bermula dari laporan Verdi Sampo melalui Polres Metro Jakarta Selatan dan Divisi Propam.

Laporan awal datang dengan kronologi bahwa korban, Brigadir Jenderal J, melakukan pelecehan seksual terhadap istri Verde Sambo yang merupakan atasan korban. Setelah kejadian ini diketahui oleh Behrada Eliezer, dalam keadaan seperti itu, Brigadir Jenderal J. yang panik segera mengeluarkan senjatanya dan akhirnya terjadi baku tembak di antara keduanya. Peluru masuk ke tubuh korban karena konon Behrad Eliezer adalah seorang penembak ulung dan terlatih dalam praktek keahlian menembak.

Terakhir, muncul laporan berupa kasus baku tembak antara Brigadir Jenderal Khosua dan Bharada Eliezer.

Setelah kasus pembunuhan terhadap Brigadir J mencuat di ranah publik, media pun berlomba-lomba dan dalam memberitakan kasus ini dari berbagai sisi, seperti *kronologi* kejadian, pelaku pembunuhan, penyebab pembunuhan, hingga isu kekerasan seksual. Kasus Ferdy Sambo menarik perhatian besar publik sepanjang akhir tahun 2022 karena melibatkan para anggota Polri dalam tindakan kriminalitas secara berkelompok dan berencana. Selayaknya peristiwa pidana lainnya, anggota penyidik Kepolisian melakukan olah TKP sesaat setelah laporan tersebut, namun sangat di sayangkan adanya intervensi dari beberapa anggota Biro Paminal Divisi Propam Polri.

Keluarga dari korban juga mendapat beberapa halangan ketika ingin melihat jasad dari Brigadir J, dari semua kejanggalan dan rekayasa tersebut membuat Polri mengambil keputusan bulat dengan membentuk tim investigasi khusus Polri agar kejadian yang juga dikawal oleh segenap masyarakat ini dapat diselesaikan secara transparan dan maksimal.

Pada Berita Acara Pemeriksaan atau BAP Ferdy Sambo terkuak permasalahan terkait olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang sempat dipermasalahkan karena dianggap tidak dilakukan secara profesional. Peran sejumlah nama perwira polisi ikut terungkap, antara lain Brigjen Benny Ali yang disebut oleh Ferdy Sambo sebagai orang yang pertama kali dia hubungi setelah dia selesai merekayasa TKP. Ferdy Sambo menyatakan menelpon Benny karena dalam skenario yang dia rancang terjadi peristiwa tembak menembak antara anggota Polri. Ferdy Sambo meminta Benny Ali untuk segera datang ke kediamannya. “Setelah menelepon Karo Provost selanjutnya saya menghubungi Kasubdit 3 Bareskrim, Kanit 1 dan Karo Paminal,” kata Ferdy Sambo seperti tertulis dalam BAP. Selain itu, Ferdy Sambo juga menghubungi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Rhekynellson Soplanit. Ridwan disebut sebagai orang yang pertama datang karena rumah dinasya bersebelahan dengan

rumah dinas Ferdy Sambo. Kepada Ridwan, Ferdy Sambo pun menceritakan skenario palsu yang telah dirancang. Ferdy Sambo pun mengakui bahwa dirinya sempat meminta Ridwan agar kasus ini tidak dibesarkan. Setelah itu, datang anggota Satreskrim Polres Jakarta Selatan untuk melakukan olah TKP. Brigjen Benny Ali dan Brigjen Hendra Kurniawan pun hadir di sana saat olah TKP.

Kepada Brigjen Hendra dan Brigjen Benny, Ferdy Sambo sempat meminta agar kasus itu ditangani secara *internal*. Dia juga meminta mereka agar memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan barang bukti berupa pistol dan *CCTV* dan mengamankan saksi Bripka Ricky, Bharada E dan Kwat Ma'ruf. Ferdy Sambo juga mengaku telah memerintahkan Wakil Detasemen B Biro Paminal AKBP Arif Rahman, untuk menghapus rekaman *CCTV* di lingkungan rumah dinas. Hal itu dia perintahkan setelah Arif melaporkan hasil pengecekannya pada 13 Juli 2022. Arif mengaku telah melihat rekaman *CCTV* itu bersama Kompol Chuk Putranto, Kompol Baiquni Wibowo dan AKBP Ridwan. Dalam BAP Ferdy Sambo, terungkap dia sempat juga mengungkap percakapan dia dengan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto yang tiba belakangan di TKP. Sambo sempat menceritakan kepada Budhi soal peristiwa di Magelang dan skenario tembak menembak antara Brigadir J dengan Bharada E itu. Sambo pun kembali mengulangi permintaannya agar penanganan kasus ini tak dibesar-besarkan karena merasa malu. Dalam BAP Ferdy Sambo, terungkap bahwa dia sempat memberikan perintah kepada asisten rumah tangganya untuk membersihkan bekas darah Brigadir J yang berada di lantai. Kombes Budhi Herdi Susianto sempat bertanya kepada asisten alasannya membersihkan bekas darah itu dan dijawab atas perintah Sambo. Kepada penyidik, Sambo beralasan memerintahkan itu karena sudah mendapatkan izin dari Ridwan yang menyatakan olah TKP sudah selesai. Pernyataan tersebut dimuat dari pemberitaan Tempo.co yang ada di Gambar 1.2.



**Gambar 1. 2** Cerita Eksklusif di BAP Ferdy Sambo Soal Olah TKP  
*Sumber : Tempo.co*

Sejak informasi terkait kasus ini di informasikan kepada masyarakat pada saat kasus ini dalam proses persidangan. Sedikit demi sedikit mulai terungkap bahwa tidak ada kasus tembak-menembak dalam kejadian tersebut, melainkan murni Bharada Eliezer menembak atas perintah Ferdy Sambo kepada Bharada Eliezer untuk menembak Brigadir J.

Beberapa anggota lain yang terlibat dalam kasus ini pun turut diseret ke persidangan dengan tuduhan *obstruction of justice* yaitu perintangan penyidikan. Kondisi ini telah mencemarkan nama baik Polri dan Polri memiliki tugas besar untuk mengungkap kasus ini namun yang jelas hal ini telah mencemarkan nama baik Polri, dan terhadap hal itu Polri memiliki tugas baru yaitu turut mengawal kasus ini agar terungkap dengan terang dan memastikan agar tidak terulang kembali. Kasus ini sudah menjadi pemberitaan di media massa dan menjadi sorotan publik sehingga berakibat pada munculnya krisis reputasi bagi institusi Polri

Akibat munculnya krisis terhadap reputasi Polri, timbul rasa ketidakpercayaan dan ketidaknyamanan di masyarakat. Hal ini bukan tanpa alasan, namun sebagai garda terdepan dan penegak hukum yang seharusnya

melindungi masyarakat, tugas utamanya melindungi masyarakat, Polri seharusnya menjadi pilihan tepat untuk mengembalikan situasi aman dan terkendali. Namun bagaimana dengan adanya kasus penembakan terhadap Brigadir J masyarakat tidak lagi merasa aman. Sebagai sebuah institusi yang memegang peran penting dalam penegakkan hukum di suatu negara, maka Polri sudah dapat dipastikan memegang tanggung jawab yang berat (Hakim & Kamelo, 2013).

Peristiwa penembakan Brigadir J secara langsung maupun tidak langsung berakibat pada runtuhnya citra dan reputasi polri sebagai aparat negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban. Selain itu, kasus Ferdy Sambo berimplikasi pada krisis komunikasi seiring dengan pemberitaan-pemberitaan di media yang melibatkan banyak pihak sebagai narasumber sehingga membawa spekulasi pada citra Polri. Strategi komunikasi untuk restorasi citra dibutuhkan dalam manajemen komunikasi krisis terutama pada periode awal krisis guna menjaga reputasi organisasi. Pada kejadian tersebut akhirnya menyebabkan Kepolisian Republik Indonesia akhir-akhir ini sedang disoroti oleh sebagian besar masyarakat, pelanggaran yang telah dilakukan baik itu pelanggaran disiplin, pelanggaran hukum sampai penyalahgunaan kekuasaan membuat citra kepolisian menurun. Hampir setiap hari media menyuguhkan berita-berita negatif hal ini menimbulkan opini negatif masyarakat. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian juga disampaikan melalui media sosial.

Sebelum kasus ferdy sambo citra polri sudah mengalami penurunan akibat beberapa kasus yang terjadi di institusi polri. Dengan adanya kasus Ferdy Sambo hal ini berakibat pada semakin menurunnya citra Polri, seperti pada salah satu postingan akun Instagram @divisihumaspolri dalam Gambar 1.3 terdapat postingan mengenai Survei Indopol : Kepercayaan Publik Terhadap Polri Meningkat. Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistiyanto mengatakan angka kepercayaan publik terhadap Polri meningkat dibandingkan pada November 2022 yakni sebesar 60,98%. Survei dilakukan

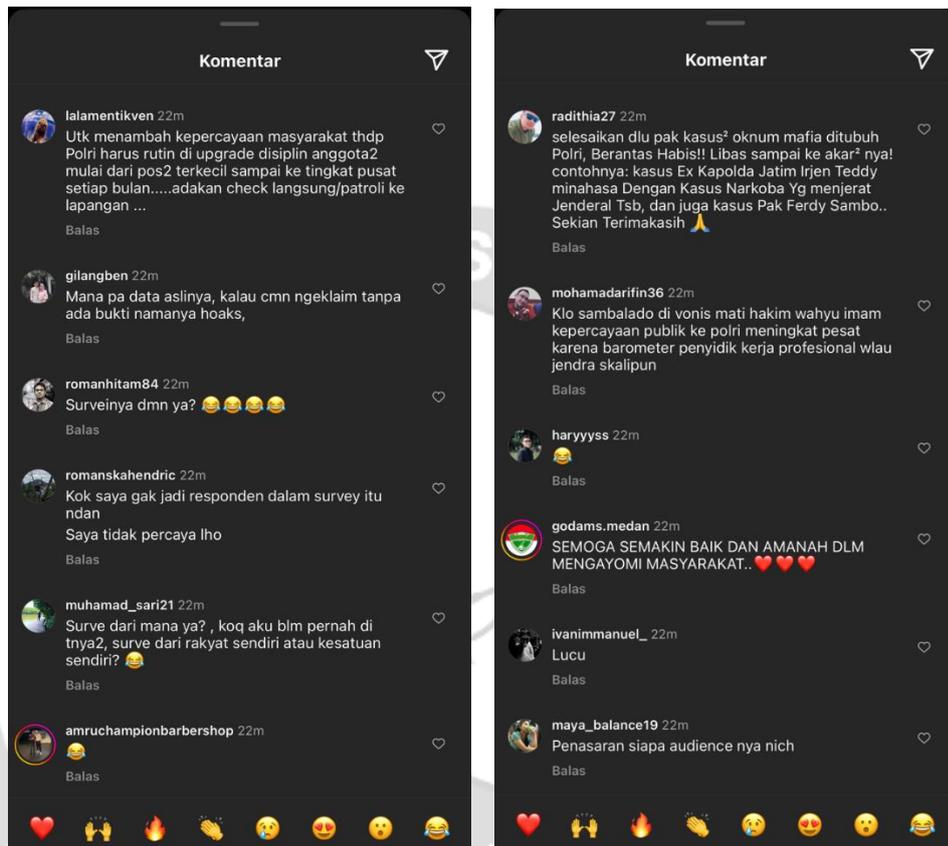
pada 14-23 Desember 2022 dengan total responden sebanyak 1.240 yang tersebar di 34 provinsi. "Indopol telah melakukan survei persepsi publik terhadap kinerja polisi di penghujung tahun 2022 dengan hasil tingkat kepercayaan publik sebesar 69.35%. Angka ini meningkat dari bulan-bulan sebelumnya," Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistiyanto. Rabu 4 Januari 2023.



**Gambar 1.3** Terdapat postingan mengenai Survei Indopol: Kepercayaan Publik Terhadap Polri Meningkat.

*Sumber: Capture dari akun Instagram @divisihumaspolri*

Pada Gambar 1.4 terdapat beberapa komentar masyarakat yang merespon postingan akun Instagram @divisihumaspolri pada Gambar 1.3 Survei Indopol : Kepercayaan Publik Terhadap Polri. Dengan komentar miring karena menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.



**Gambar 1. 4** Komentar masyarakat merespon postingan Survei Indopol : Kepercayaan Publik Terhadap Polri.

*Sumber: Capture* dari kolom komentar akun Instagram @divisihumaspolri

Polri sebagai salah satu lembaga pelayanan publik mengalami pasang surut dalam membangun citra yang positif dalam berinteraksi dengan publik. Penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai optimalisasi Polri sebagai pelayan publik dalam mengatasi krisis komunikasi dalam kasus Ferdy Sambo. Pengertian Krisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), krisis merupakan keadaan yang berbahaya (dalam menderita sakit); parah sekali atau keadaan genting atau kemelut yang memberikan efek yang suram terhadap ekonomi moral dan sebagainya. Di sisi lain krisis

juga memberikan manfaat seperti penjelasan menurut (Mejri & De Wolf, 2013), menurutnya krisis memiliki potensi sebagai kekuatan baru bagi organisasi dan dapat dijadikan sebagai sebuah pembelajaran. Berdasarkan penelitian sebelumnya, krisis merupakan suatu peristiwa/fenomena yang sedang terjadi atau diperkirakan mengarah pada situasi tidak stabil dan berbahaya jika tidak diatasi dengan baik, situasi yang berbahaya tersebut apabila diatasi dengan baik maka akan menjadikan suatu titik balik kearah yang lebih baik, namun apabila tidak ditangani dengan baik maka akan menjadi suatu titik balik yang buruk bagi organisasi maupun perusahaan. Untuk melihat bagaimana reaksi publik terhadap situasi dan krisis humas mengatasi krisis dapat menggunakan *Situational Crisis Communication Theory (SCCT)*.

Terdapat tiga elemen yang paling umum untuk mendefinisikan suatu krisis yaitu ancaman bagi organisasi, unsur kejutan dan keputusan waktu singkat. Pada saat krisis terjadi komunikasi merupakan suatu hal yang fundamental untuk dapat meredam krisis agar tidak meluas. Praktisi humas harus memiliki kompetensi komunikasi dan manajemen yang baik agar krisis dapat diatasi sebaik mungkin (Mikušová & Horváthová, 2019). Untuk melihat bagaimana humas mengatasi krisis dapat menggunakan *Situational Crisis Communication Theory (SCCT)*.

Seiring berjalannya waktu krisis terhadap citra Kepolisian semakin besar, hal ini bukan hanya disebabkan oleh kasus Ferdy sambo namun disebabkan juga oleh beberapa kasus lain yang mencoreng citra kepolisian. Salah satunya Tragedi Kanjuruhan pada awal Oktober, terjadi tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang usai pertandingan Arema FC vs Persebaya. Dalam tragedi itu setidaknya ada 132 orang tewas karena berdesak-desakan ingin keluar setelah penembakan gas air mata oleh Polisi. Belum juga selesai kritik publik soal kejadian tersebut, muncul pemberitaan terkait penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Irjen Teddy Minahasa. Kasus ini terungkap sepekan sebelum Teddy dilantik sebagai Kapolda Jawa Timur. Dalam kasus ini Teddy disebut menjadi pengendali penjualan narkoba

seberat lima kilogram. Keterlibatan Teddy diketahui setelah tim dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah petugas polisi terkait peredaran narkoba. Selain Teddy, anggota polisi lainnya yang terseret adalah Aipda AD, Kompol KS, Aiptu J, dan AKBP D. Para tersangka masing-masing memiliki peran di bawah kendali Irjen Teddy.

Untuk menangani kasus penyalahgunaan narkoba ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengaku telah meminta Kepala Divisi Propam Polri agar melaksanakan sidang etik terhadap Irjen Teddy Minahasa yang ditangkap terkait kasus narkoba. Langkah ini diambil sebagai salah satu bentuk sebagai usaha kapolri mengembalikan citra Polri. Dengan berbagai macam kasus yang dihadapi humas polri berperan dalam mengembalikan citra polri. Listyo mengatakan Teddy terancam pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat dari Polri. Langkah ini diambil sebagai salah satu bentuk usaha Kapolri mengembalikan citra Polri. Dengan berbagai macam kasus yang dihadapi Humas Polri berperan dalam mengembalikan citra Polri, salah satunya dengan melakukan strategi restorasi citra Polri yang dilakukan oleh Kapolri, Listyo Sigit Prabowo melalui *konferensi pers* dan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR. *Konferensi pers* yang dilaksanakan Polri terkait kasus Ferdy Sambo tersebut pertama kali dilakukan pada 18 Juli 2022 (yang selanjutnya disebut sebagai awal krisis), yang mengumumkan keputusan untuk menonaktifkan Ferdy Sambo sebagai Kadiv Propam Polri. *Konferensi pers* berikutnya dilakukan pada 9 Agustus 2022 (yang disebut pasca awal krisis) dan kemudian menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka dalam terbunuhnya Brigadir Yosua. Selanjutnya, gelar rapat kerja dengan Komisi III DPR dilakukan pada 24 Agustus 2022.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan kehumasan Polri sudah sering dilakukan salah satunya yang pernah dilakukan oleh Yogie Alwaton, dengan judul penelitian “Komunikasi Krisis Polri: Strategi *Image Repair* Polri Dalam Tragedi Kanjuruhan” yang diteliti pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif melalui teks yang diterbitkan

Kompas.com periode 1 Oktober – 1 November 2022. Penelitian ini menganalisis isi statement dan perbuatan yang telah dilakukan Polri dalam krisisnya pada Tragedi Kanjuruhan. Pada peneliti ini menggunakan konsep Benoit (1997) mengenai *image repair theory* sebagai pisau analisis.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, pihak Polri sangat berfokus pada pengembalian citra dengan banyak menggunakan strategi-strategi seperti *simple denial*, *provocation*, *defeasibility*, *good intention*, *bolstering*, *compensation* dan *corrective action*.

Penelitian terkait humas kepolisian juga pernah dilakukan oleh Anismar dan Viki Fitiran, dengan judul penelitian “Strategi Humas Polres Lhokseumawe Dalam Membentuk Citra Positif (Studi Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Nova)” yang diteliti pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Pembentukan Citra atau *Image Building*. Untuk itu terdapat berbagai strategi sebagai upaya untuk membentuk citra, seperti adanya musyawarah atau rapat, publikasi media sebagai upaya mengembalikan citra yang positif, dan IMM (Intelijen Multimedia Manajemen) sebagai alat ukur keberhasilan citra positif yang dibentuk.

Berdasarkan hasil analisis Polres Lhokseumawe memakai strategi Counter Opini, yaitu menimpa berita negatif dengan berita-berita yang positif, berita positif tersebut dibuat secara maksimal dan di publish ke media. Untuk mengukur keberhasilan dari upaya pembentukan citra positif yang dilakukan oleh Humas Polres Lhokseumawe dengan menggunakan Aplikasi IMM (Intelijen Manajemen Multimedia). Peran dan fungsi kehumasan Polres Lhokseumawe hanya berfokus pada pengelolaan media saja. Keterlibatan praktisi Humas Polres Lhokseumawe dengan masyarakat secara langsung belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai upaya untuk pembentukan citra yang positif.

Pada penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti saat ini terdapat persamaan, antara lain pada penelitian terdahulu membahas mengenai

strategi Humas Polri dalam menangani suatu kasus yang menimpa institusi Kepolisian dan juga mempunyai studi kasus yang signifikan yang dimana kasus tersebut menyeret seseorang atau oknum institusi kepolisian sendiri. Selain persamaan dengan penelitian terdahulu, peneliti yang dilakukan peneliti juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya terdapat antara lain penggunaan teori, dan objek penelitian yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh mengenai bagaimana institusi Polri menghadapi masalah yang menerpa mereka. Selain itu peneliti juga tertarik melihat bagaimana optimalisasi dalam menangani krisis Polri pada kasus Ferdy Sambo. Dengan terjadinya peristiwa yang menimpa Polri maka hal ini harus menjadi sebuah evaluasi dan juga semangat baru untuk memperbaiki nama Polri dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Kepolisian, karena Polisi dalam menjalankan tugasnya harus selalu taat pada hukum yang berlaku, menjadi contoh bagi masyarakat, dan pada kasus yang menimpa Polri harus dijadikan pelajaran bagi setiap anggotanya agar hal ini tidak terulang di kemudian hari, setiap anggota Polri harus menjadi lambang keadilan dan bukan justru sebaliknya.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dan pentingnya citra baik sebuah institusi, maka penelitian ini mencoba mengeksplorasi rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini mengenai kasus penembakan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo sebagai seorang petinggi Polri terhadap bawahannya yaitu Brigadir Nofriansyah Joshua menjadi sebuah hal yang sangat tidak terduga bahkan oleh institusi Polri sendiri, maka pada perumusan masalah penelitian ini akan menguraikan optimalisasi humas polri dalam mengembalikan citra kepolisian pada masyarakat, penelitian ini perlu mengelola citra positif, dan menginformasikan secara kredibel di mata masyarakat perlu dilakukan oleh setiap lembaga pemerintahan, khususnya dalam hal ini adalah lembaga

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) sehingga masyarakat dapat membangun kepercayaan penuh, atas beberapa kasus yang telah menimpa pihak instansi kepolisian. Untuk itu pada penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana optimalisasi peran humas polri dalam menangani krisis polri pada kasus penembakan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi peran humas Polri dalam menangani krisis Polri pada kasus penembakan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Optimalisasi ini penting diteliti untuk menunjukkan bagaimana peran humas Polri dalam menangani krisis Polri pada kasus Ferdy Sambo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan peran manfaat sebagai berikut :

a. **Manfaat Secara Akademis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi Ilmu Komunikasi. Terutama dalam kajian Komunikasi *Publik Relation* / Humas, spesialisasi optimalisasi komunikasi Humas dalam menangani krisis polri pada suatu kasus yang terjadi pada Polri. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi secara akademis sebagai bahan pengetahuan dan bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.

b. **Manfaat Praktis**

Sebagai Referensi dan Sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu komunikasi khususnya di bidang kehumasan, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting khususnya bagi lembaga humas pemerintah agar menjadi

salah satu daftar bacaan untuk menambah ilmu wawasan mengenai optimalisasi peran Humas Polri dalam menangani krisis pada suatu kasus yang terjadi. Agar dapat menerapkan proses optimalisasi untuk menangani krisis polri dengan tahapan proses sosialisasi yang sesuai dan tepat agar pesan dan informasi yang diberikan menjadi lebih efektif.

c. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai optimalisasi Humas Polri untuk mewujudkan Polisi yang profesional, modern dan terpercaya (Polisi Promoter), sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi Kepolisian dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri. Dan juga kepada masyarakat bisa lebih bijaksana dalam menerima atau mencerna suatu pemberitaan agar bisa lebih selektif dan tidak mudah terpancing dengan pemberitaan yang informasinya tidak akurat.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penghubung antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masyarakat dalam upaya kepolisian mengelola penyampaian prestasi kinerja, sosialisasi edukasi polri kepada publik secara informatif dan transparan, dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meminimalkan stigma kurang baik masyarakat terhadap kepolisian negara republik Indonesia bahwa tidak bisa transparan dan informatif saat mengemukakan informasi serta kinerja kepolisian.